

**TIDAK MAMPU BERTANGGUNG JAWAB  
DALAM HUKUM PIDANA  
DAN PENGATURANNYA DI MASA  
MENDATANG<sup>1</sup>**

Oleh : Andrey Elby Rorie<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana jiwanya cacat dalam pembunuhan dan jiwanya terganggu karena penyakit mengakibatkan orangnya tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan bagaimana pengaturan hal tersebut di masa mendatang. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dapat disimpulkan bahwa: 1. Keadaan jiwa cacat dalam pertumbuhan yang dimaksudkan oleh Pasal 44 ayat (1) KUHPidana adalah keterbelakangan perkembangan sejak yang telah dibawa sejak lahir. 2. Dalam Pasal 34 RUU KUHPidana 1999/2000 tidak lagi digunakan istilah "pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit", melainkan menyebut sebagai alasan untuk tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah : gangguan jiwa, penyakit jiwa dan retardasi mental.

Kata kunci: Tidak mampu bertanggung jawab.

**PENDAHULUAN:**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan orang-orang yang keadaan jiwanya tidak normal. Orang-orang itu, apabila ketidaknormalan jiwanya parah, dalam percakapan-sehari disebut sebagai "orang gila". Istilah ini bukanlah istilah hukum melainkan istilah dalam percakapan sehari-hari. Selain itu ada pula orang-orang yang dalam percakapan sehari-hari itu tidak disebut sebagai "orang gila" tetapi jelas memiliki cacat mental, yang dalam percakapan sehari-hari umumnya dikatakan sebagai orang-orang "idiot".

Orang-orang ini mendapatkan perhatian dalam hukum pidana, yaitu KUHPidana kita, karena merupakan kenyataan bahwa mereka adakalanya juga melakukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti membunuh dan mencuri.

Bagaimana perlakuan terhadap orang-orang sedemikian dalam hukum pidana, dalam KUHPidana diatur pada Pasal 44. Pasal 44 KUHPidana, menurut terjemahan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, memberikan ketentuan yang sebagai berikut,

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu di- masukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. 3

Pasal 44 ayat (1) KUHPidana tersebut diatur salah satu dari apa yang dalam doktrin dinamakan alasan-alasan penghapus pidana (Bld.: *strafuitsluitingsgronden*). Seseorang yang keadaan psikisnya sebagaimana yang ditentukan dalam ayat ini - yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit - , sekalipun ia telah melakukan suatu perbuatan yang jelas-jelas sudah mencocoki rumusan suatu ketentuan pidana, tidaklah dapat dipidana. Pasal 44 ayat (2) KUHPidana diatur mengenai tindakan (Bld.: *maatregel*) yang dapat

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711044

---

<sup>3</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal.30-31.

dikenakan oleh hakim berkenaan dengan orang yang berada dalam keadaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana. Selanjutnya, dalam Pasal 44 ayat (3) KUHPidana, ditentukan pengadilan mana yang mempunyai wewenang yang ditentukan dalam ayat (2) Pasal 44 KUHPidana, yaitu wewenang untuk memasukkan seorang terdakwa ke rumah sakit jiwa sebagai masa percobaan. Menurut ayat ini, yang memiliki wewenang tersebut hanyalah Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri saja. Pengadilan-pengadilan lainnya, tidak diberikan wewenang sedemikian.

Pasal 44 KUHPidana merupakan salah satu pasal yang perlu mendapatkan perhatian karena di situ diatur mengenai orang-orang yang dapat dikatakan di satu pihak bernasib malang tetapi di lain pihak telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar kepentingan hukum orang lain. Jadi, di dalamnya terkandung aspek kemanusiaan, yaitu perlunya perlakuan khusus terhadap orang-orang yang secara umum dikatakan sebagai tidak normal jiwanya, dan aspek penegakan hukum pidana karena telah ada orang yang dirugikan akibat perbuatannya.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, dalam batas manakah seseorang dapat dikatakan sebagai berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan itu. Kata-kata “jiwanya cacat dalam pertumbuhan” dan “jiwanya terganggu karena penyakit” merupakan kata-kata yang bersifat umum. Dari kata-kata itu sendiri belum dapat ditentukan ukuran untuk menentukan bahwa yang bersangkutan memang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hal lainnya yang dapat dikemukakan berkenaan dengan rumusan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana ini, yaitu rumusan pasal tersebut disusun ketika psikiatri (ilmu penyakit jiwa) masih dalam tahap perkembangan. Dengan demikian menjadi pertanyaan pula apakah ketentuan dalam

pasal tersebut masih memenuhi kebutuhan untuk masa sekarang ini.

Pertanyaan ini penting untuk masa sekarang, sebab Indonesia sedang dalam tahap untuk dapat memiliki suatu KUHPidana Nasional guna menggantikan KUHPidana peninggalan Pemerintah Hindia Belanda itu. Beberapa draft KUHPidana telah disusun, terakhir yaitu Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana 1999/2000. Bagaimana pengaturan mengenai pokok tersebut dalam rancangan undang-undang ini perlu mendapatkan perhatian.

#### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan jiwanya terganggu karena penyakit mengakibatkan orangnya tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana?
2. Bagaimana pengaturan hal tersebut di masa mendatang?

#### E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif

#### PEMBAHASAN:

##### A. Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Karena Jiwanya Cacat dalam Pertumbuhan dan Jiwanya Terganggu Karena Penyakit

Teks resmi (bahasa Belanda) dari Pasal 44 ayat (1) KUHPidana menggunakan istilah “*gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens*”, yang oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional telah diterjemahkan sebagai : jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Dengan demikian, bagian kalimat: jiwanya cacat dalam pertumbuhan merupakan

terjemahan dari "*gebrekkige ontwikkeling ... zijner verstandelijke vermogens*".

Perubahan istilah di negeri Belanda ini tidak diikuti di Indonesia sampai sekarang ini, di mana teks resmi Pasal 44 ayat (1) K.U.H.P. Indonesia tetap menggunakan istilah : *verstandelijke vermogens*. Mengenai tetap digunakannya istilah "*verstandelijke vermogens*" dalam Pasal 44 KUHPidana, dikatakan oleh Moeljatno, Perlu dinyatakan disini, bahwa dalam pasal 44 mengenai perkataan jiwa dalam bahasa Belanda dipakai kata kekuatan akal (*verstandelijke vermogens*). Dalam Swb Nederland *verstandelijke vermogens* sudah diganti menjadi *geestvermogens* (kekuatan rohani = jiwa), sebab bukan akal saja yang penting tapi juga perasaan dan kehendak. Meskipun *strafwetboek Ned. Indie* dahulu belum mengikuti perubahan tersebut, tetapi dalam praktek telah dianggap seakan-akan sudah ada perubahan.<sup>4</sup>

Berikut akan dilakukan pembahasan satu-persatu terhadap keadaan jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan jiwanya terganggu karena penyakit yang membawa akibat orangnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

1. Tidak dapat dipertanggungkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan.

Mengenai tidak dapat dipertanggungkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan, dikatakan oleh Kanter dan Sianturi bahwa, "yang dimaksud dengan keadaan jiwa yang cacat karena pertumbuhannya ialah seseorang yang sudah dewasa, tetapi perangnya seperti anak-anak. Keadaan seperti ini disebut sebagai "dungu", setengah mateng atau idiotisme, imbeciliteit, yang diakibatkan oleh

keterlambatan pertumbuhan jiwa seseorang".<sup>5</sup>

Berikut ini akan dikemukakan pengertian idiot dan imbesil dengan mengutip pendapat ahli di bidang tersebut. Oleh Kartini Kartono, orang-orang yang mempunyai kecerdasan yang terendah dibaginya atas :

- idiot;
- imbisil; dan
- debil.

Masing-masing golongan ini akan dijelaskan secara singkat untuk dapat dilihat perbedaannya. Mengenai keadaan idiot pada umumnya diberikan penjelasan oleh Kartini Kartono, I.Q.-nya (Intelegency Quotient) kurang dari 25. Oleh karena cacat jasmani dan rohaninya begitu berat, pada umumnya mereka tidak mampu menjaga dirinya sendiri terhadap bahaya yang datangnya dari luar. Intellegensinya tidak bisa berkembang; tidak bisa mengerti dan tidak bisa diajar apa-apa. Mereka tidak memiliki instink-instink yang fundamentil dan tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri serta melindungi diri.<sup>6</sup>

Seringkali diferensiasi atau perbedaan antara kelaim laki-laki dengan kelamin perempuannya tidak jelas. Mereka ini mengalami defekt atau kwerusakan mental yang ekstrim. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menanggapi/menghayati stimulus; ada lack of perception. Kadang-kadang mereka itu tidak bisa menerima rangsangan sinar, rabaan atau bau, dan tidak punya ingatan. Mereka harus dimandikan, harus diberi pakaian, harus disuapi jika makan, seperti layaknya seorang bayi. Sering mereka ini ngompol dan buang kotoran dicelanya, dan sukar sekali diajari menjaga kebersihan diri.

<sup>5</sup> E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 258.

<sup>6</sup> Kartini Kartono, Psikologi Abnormal & Pathologi Seks, Alumni, Bandung, 1979, hal. 38.

<sup>4</sup> Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, cet.ke-2, 1984, hal.113.

Mengenai keadaan imbesil (*imbecility*) diberikan penjelasan oleh Kartini Kartono I.Q.-nya 25-49. Mereka itu seperti kanak-kanak yang berumur 36-83 bulan (3-7 tahun). Ukuran tinggi dan bobot badannya kurang; sering badannya cacat atau mengalami kelainan-kelainan (anomali). Gerakan-gerakannya tidak stabil dan lamban. Ekspresi mukanya kosong dan ketolol-tololan. Kurang mempunyai daya tahan terhadap penyakit. Perkembangannya baik jasmani maupun rohaninya sangat lambat. Kurang sambutan jika diajak berbicara. 40 % mereka ini menderita penyakit ayan/epilepsi. Pada umumnya mereka tidak mampu mengemudikan dan mengurus diri sendiri. Namun demikian, mereka masih dapat diajari untuk menanggapi suatu bahaya; dan bisa diajari melindungi diri terhadap bahaya fisik tersebut. Mereka bisa mengerjakan tugas yang sederhana di bawah pengawasan, misalnya : makan sendiri, minum, berpakaian, mencuci dan mengelap piring. Ada defektivitas dalam kapasitas edukasinya; dalam artian : mereka itu tidak bisa diajar dalam sekolah konvensional. Dengan sendirinya mereka sangat bergantung pada perlindungan dan pertolongan keluarga atau orang tuanya, karena mereka ini sama sekali tidak mampu mencari mata pencarian sendiri.<sup>7</sup>

Keadaan idiot dan imbesil, pada umumnya diakui sebagai termasuk ke dalam keadaan jiwanya cacat dalam pertumbuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana, sehingga orang-orang demikian tidak dapat dipidana. Keadaan debil, pada umumnya tidak diakui sebagai suatu alasan penghapus pidana. Orang-orang yang tergolong debil tidak termasuk ke dalam tidak mampu bertanggungjawab (*ontoerekeningsvatbaarheid*)

melainkan hanya dapat digolongkan ke dalam kurang mampu bertanggungjawab (*verminderde toerekeningsvatbaarheid*).

Keadaan kurang mampu bertanggungjawab ini tidaklah dapat menjadi alasan untuk melepaskan seorang dari pidana seluruhnya. Keadaan ini hanya dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yaitu dapat menjadi alasan untuk pengurangan pidana.

## 2. Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Karena Jiwanja Terganggu Karena Penyakit

Oleh Kanter dan Sianturi diberikan penjelasan bahwa, ... yang dimaksudkan dengan jiwa yang terganggu karena penyakit, ialah yang jiwanya semula adalah sehat, tetapi kemudian dihindangi penyakit jiwa yang sering disebut sebagai “gila” atau “pathologische ziektoestand”. Seseorang mungkin dihindangi oleh penyakit jiwa secara terus menerus tetapi mungkin juga secara sementara (temporair) atau kumat-kumatan. Dalam hal ini gila kumat-kumatan yang termasuk cakupan Pasal 44 adalah jika gila sedang kumat.<sup>8</sup>

Jika jenis-jenis pidana telah ditempatkan dalam satu pasal, yaitu pasal 10 KUHPidana, maka jenis-jenis tindakan (*maatregel*) tersebar dalam pasal-pasal KUHPidana, misalnya : pemidanaan bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a – 14f KUHPidana.

Jadi, jika hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena “jiwanja cacat dalam pertumbuhan” atau “terganggu karena penyakit”, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana (*straf*). Tetapi sebagai tindakan (*maatregel*) untuk mencegah bahaya bagi masyarakat maupun orang itu sendiri, maka hakim dapat memerintahkan untuk memasukkan yang bersangkutan ke dalam rumah sakit jiwa selama-lamanya 1 (satu) tahun sebagai

<sup>7</sup> Ibid., hal. 40-41.

<sup>8</sup> Kanter. Sianturi, Loc.cit.

waktu percobaan. Ayat (2) ini dimulai dengan kata-kata “jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya ...”. Kata “ternyata” menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki bahwa hal tidak dapat dipertanggungjawabkan itu harus disertai dengan bukti yang kuat. Hal tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut merupakan sesuatu yang diyakini oleh hakim berdasarkan alat-alat bukti yang ada. Dengan demikian berarti harus ada keterangan ahli atau *visum et repertum* mengenai hal tersebut. Suatu persangkaan oleh hakim semata-mata, tanpa keterangan ahli atau *visum et repertum*, belum memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Pasal 44 ayat (2) KUHPidana.

Putusan yang menyatakan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, hakim dapat pula memerintahkan agar terdakwa dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Perintah untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa itu paling lama 1 (satu) tahun sebagai waktu percobaan. Sebenarnya ada prosedur lain di mana hakim dapat memasukkan seorang ke rumah sakit jiwa tanpa terlebih dahulu memutuskan bahwa terdakwa terbukti tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Tahun 1966 No.23, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No.2805), dikatakan bahwa, Untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan pada suatu tempat perawatan harus ada permohonan dari salah seorang yang tersebut di bawah ini :

- a. si penderita, jika ia sudah dewasa.
- b. Suami/isteri atau seorang anggota keluarga yang sudah dewasa.
- c. Wali dan/atau yang dapat dianggap sebagai wali si penderita.
- d. Kepala Polisi/Kepala Pamongpraja di tempat tinggal atau di daerah di mana si penderita ada.

e. Hakim Pengadilan Negeri, bilamana dalam suatu perkara timbul persangkaan bahwa yang bersangkutan adalah penderita penyakit jiwa.<sup>9</sup>

Berdasarkan huruf e Pasal 5 ayat (1) ini, dengan berdasarkan persangkaan saja bahwa yang bersangkutan adalah penderita penyakit jiwa, hakim dapat mengajukan permohonan kepada rumah sakit jiwa untuk memasukkan terdakwa ke dalamnya. Tetapi yang lebih umum dilakukan oleh hakim pidana adalah nanti memerintahkan seorang dimasukkan ke rumah sakit jiwa jika terbukti berdasarkan alat bukti yang sah bahwa terdakwa memang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit.

Mengenai wewenang menahan seorang di rumah sakit jiwa atas perintah hakim pidana yang hanya paling lama 1 (satu) tahun, sebenarnya dapat menimbulkan pertanyaan : apakah waktu itu cukup untuk upaya mengobati yang bersangkutan dan melindungi masyarakat. Tetapi ketentuan ini merupakan hal yang dapat dimaklumi sebab perkiraan jangka waktu untuk upaya merawat dan mengobati seorang sakit jiwa sudah merupakan bidang di luar pengetahuan hakim yang bukan seorang psikiater. Adalah sudah tepat bahwa penentuan waktu percobaan itu paling lama 1 (satu) tahun. Dengan berdasarkan hasil pemeriksaan selama dalam waktu percobaan itu, psikiater lah yang lebih berwenang untuk menentukan apakah terdakwa masih memerlukan perawatan dan pengobatan lebih lanjut atau tidak. Jika kemudian ternyata menurut pendapat psikiater rumah sakit jiwa yang bersangkutan masih memerlukan perawatan dan pengobatan, maka hal itu bukan lagi merupakan urusan hakim pidana yang telah memerintah memasukkan terdakwa ke rumah sakit jiwa sebagai waktu percobaan.

---

<sup>9</sup> Tan Pariaman, Op.cit., hal.228.

KUHPidana juga tidak membuat ketentuan agar rumah sakit jiwa itu memberikan laporan tentang keadaan orang yang bersangkutan setelah selesai waktu percobaannya. Dalam hal ini perlu mendapat perhatian bahwa orang yang melakukan tindak pidana tapi oleh hakim diperintahkan dimasukkan ke rumah sakit jiwa sebenarnya merupakan orang berbahaya bagi masyarakat. Tetapi KUHPidana tidak mengatur pengawasan lebih lanjut terhadap orang itu.

Menurut pendapat penulis, seharusnya ada ketentuan bahwa hasil pemeriksaan selama waktu percobaan tersebut disampaikan kepada pihak kepolisian yang menyidik perkara itu, jaksa penuntut umum yang menuntutnya dan hakim yang menjatuhkan putusan. Ini karena polisi dan jaksa, untuk kepentingan umum, mempunyai wewenang untuk mengajukan permintaan agar seseorang di masukkan ke rumah sakit jiwa.

## B. Pengaturan Di Masa Mendatang

Indonesia sekarang ini masih dalam tahap mempersiapkan suatu rancangan Kitab undang-undang Hukum Pidana Nasional untuk menggantikan KUHPidana peninggalan masa Hindia Belanda.

Sebelum RUU tentang KUHPidana 1999/2000, telah ada Naskah Rancangan yang disusun oleh Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992 yang telah disempurnakan oleh Tim Kecil sampai dengan 13 Maret 1993.

Dalam Bab II (Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana) dari Buku Kesatu (Ketentuan Umum) Naskah Rancangan itu terdapat paragraf 9 yang berjudul Kemampuan Bertanggung Jawab. Paragraf 9 ini memiliki dua pasal sebagai berikut :

### Pasal 38

Barangsiapa melakukan tindak pidana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena menderita

gangguan jiwa atau penyakit jiwa atau retardasi mental tidak dipidana dan dapat dikenakan tindakan.

### Pasal 39

Apabila si pembuat pada waktu melakukan tindak pidana ternyata kurang dapat dipertanggung jawabkan karena menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa atau retardasi mental, maka hakim dapat mengurangi pidana yang berlaku baginya atau mengenakan tindakan kepadanya.<sup>10</sup>

Masalah perbedaan antara teks resmi yang menggunakan istilah *verstandelijke vermogens* dengan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia yang lebih sering diterjemahkan sebagai : jiwa, telah diselesaikan oleh Pasal 38 Naskah Rancangan. Pasal 38 Naskah Rancangan telah menggunakan istilah jiwa. Tetapi, ini tidak berarti istilah akal tidak lagi mempunyai arti penting. Dalam Naskah Rancangan Penjelasan dapat ditemukan keterangan bahwa,

Untuk dapat dikatakan bahwa seseorang mampu bertanggungjawab yang menentukan adalah faktor akalnya. Akalnya yang dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Dalam hal tidak mampu bertanggungjawab, keadaan akal pembuat tidak normal, oleh karena akalnya memang tidak berfungsi normal. Tidak normalnya fungsi akal itu disebabkan karena perubahan pada fungsi jiwanya yang mengakibatkan gangguan pada kesehatan jiwanya.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992, Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Baru). Buku Kesatu – Buku Kedua, Departemen Kehakiman, fotokopi, tanpa tahun, hal.10.

<sup>11</sup> Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992, Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Baru). Buku Kesatu – Buku Kedua (Penjelasan), Departemen Kehakiman, fotokopi, tanpa tahun, hal.23.

Perbedaan lain dengan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana adalah bahwa Pasal 38 Naskah Rancangan tidak lagi menyebut tentang kriteria “pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit”. Penyebutan kriteria-kriteria ini dipandang terlalu membatasi dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan psikiatri.

Naskah Rancangan hanya menyebut pokok-pokoknya saja, yaitu :

- gangguan jiwa;
- penyakit jiwa;
- retardasi mental.

Sekalipun dalam Pasal 38 Naskah Rancangan diadakan perbedaan antara gangguan jiwa dengan penyakit jiwa, tapi dalam Naskah Rancangan Penjelasan terhadap pasal ini tidak ada penegasan tentang perbedaan antara kedua hal itu. Dalam Naskah Rancangan Penjelasan hanya diberikan keterangan bahwa,

Yang dimaksud dengan gangguan jiwa atau penyakit jiwa yaitu sesuatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada kesehatan jiwa.

Melakukan tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berarti :

- a. tidak mampu untuk memaksudkan suatu tujuan yang sadar atau
- b. tidak mampu untuk mengarahkan kemauannya, atau
- c. tidak mampu untuk memahami dan menginsyafi tentang sifat melawan hukum dari tindakannya.<sup>12</sup>

Jadi, tidaklah semua gangguan jiwa atau penyakit jiwa mengakibatkan seseorang tidak dapat dipidana. Hanya gangguan jiwa dan penyakit jiwa yang memenuhi tiga syarat yang disebutkan dalam Naskah Rancangan Penjelasan di atas yang membuat seseorang tidak dapat dipidana. Mengenai retardasi mental diberikan keterangan,

Yang dimaksud dengan retardasi mental ialah suatu keadaan yang memenuhi memenuhi tiga kriteria :

1. karena retardasi mental maka fungsi intelektual umum berada di bawah rata-rata yang cukup berarti (I.Q. di bawah 70);
2. retardasi mental berakibat atau berkaitan dengan kehendaknya dalam perilaku adaptif (tidak mampu untuk memenuhi norma berdikari dan tanggungjawab sosial sesuai dengan usia dan lingkungan budaya).
3. Retardasi mental mulai timbul di bawah usia delapan tahun.<sup>13</sup>

Apa yang dimaksudkan dengan retardasi mental adalah sama halnya dengan “pertumbuhan jiwanya cacat” dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana

Hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai penentuan I.Q. dalam Naskah Rancangan, yaitu disebutkan I.Q. di bawah 70. Dalam pendapat-pendapat yang dikemukakan di bagian depan jelas bahwa sekarang ini pada umumnya mereka yang tergolong debil yang ber-I.Q. 50-70 tidaklah termasuk ke dalam orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Naskah Rancangan bermaksud memasukkan golongan debil ini sebagai orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Apa yang dikemukakan dalam Naskah Rancangan terlalu berlebihan. Seperti dikemukakan di bagian depan, umur intelegensi debil adalah seperti anak-anak umur 7 – 16 tahun. Orang dengan kecerdasan usia 15-16 tahun misalnya, seharusnya sudah dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun tanggungjawab yang dipikulnya tidaklah harus persis sama dengan orang dewasa.

Dengan demikian, terhadap golongan debil, yaitu yang ber-I.Q. 50-70, dengan umur intelegensi seperti anak-anak umur 7-16 tahun seharusnya diadakan suatu pembedaan. Mereka yang sekalipun tergolong debil, tapi memiliki I.Q. yang tertinggi dalam golongan itu, yaitu mendekati 70, seharusnya lebih tepat

<sup>12</sup> Ibid., hal. 24.

<sup>13</sup> Ibid.

digolongkan sebagai orang yang kurang mampu bertanggungjawab. Pendapat seperti ini dianut oleh para psikiatri sebagaimana yang telah dikutipkan di bagian depan.

Mengenai kurang mampu bertanggungjawab yang diatur pada Pasal 39 Naskah Rancangan, dalam Naskah Rancangan Penjelasan diberikan keterangan,

Yang dimaksudkan dengan kurang mampu untuk mengarahkan kemauan dalam rangka pertanggungjawaban, ialah disabilitas mental pada seseorang untuk mengarahkan kemauan atau kehendaknya dalam rangka pertanggung jawaban. Dalam hal yang disebutkan dalam pasal di atas ini, yaitu pembuat dinilai sebagai kurang mampu untuk menginsyafi tentang sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsyafan itu dapat dipidana, tetapi dikurangi namun hakim dapat juga hanya menjatuhkan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa, atau menyerahkan pembuat kepada pemerintah untuk diambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>14</sup>

Dalam RUU KUHPidana 1999/2000, dapat ditemukan Pasal 34 dan 35 sebagai berikut:

#### Pasal 34

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.

#### Pasal 35

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana akurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Rancangan Undang-undang Nomor ... Tahun ... tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana,

Pasal 34 dan Pasal 35 ini dapat dikatakan telah disusun dengan tetap mengikuti Pasal 38 dan 39 dari Naskah Rancangan yang disusun oleh Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992 yang telah disempurnakan oleh Tim Kecil sampai dengan 13 Maret 1993.

Sedikit perbedaan adalah mengenai penjelasan terhadap pengertian “retardasi mental”, di mana dikatakan bahwa,

Yang dimaksud dengan “retardasi mental” adalah suatu keadaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. fungsi intelektual umum berada di bawah rata-rata yang cukup berarti;
2. tidak mampu memenuhi norma berdikari dan tanggung jawab sosial sesuai dengan usia dan lingkungan budaya; dan
3. mulai timbul di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Dalam penjelasan ini, berkenaan dengan fungsi intelektual umum, tidak lagi dicantumkan ukuran “I.Q. di bawah 70”.

Mengenai tindakan yang dapat dikenakan, Pasal 94 ayat (1) RUU KUHPidana 1999/2000 dikatakan bahwa setiap orang yang memenuhi ketentuan Pasal 34 dan pasal 35, dapat dikenakan tindakan berupa :

- a. perawatan di Rumah Sakit Jiwa;
- b. penyerahan kepada pemerintah; atau,
- c. penyerahan kepada seseorang.

Selanjutnya dalam Pasal 96 ayat (1) Naskah Rancangan ditentukan bahwa tindakan berupa perawatan di Rumah Sakit jiwa diputus oleh hakim setelah pembuat tindak pidana dilepas dari segala tuntutan hukum dan yang bersangkutan masih dianggap berada dalam keadaan yang berbahaya.

RUU KUHPidana 1999/2000 ini tidak lagi disebutkan tentang waktu percobaan yang selama-lamanya 1 (satu) tahun. Dengan demikian penempatan di Rumah Sakit Jiwa

Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 1999-2000, hal.15.



adalah memang bukan lagi sebagai waktu percobaan tetapi untuk perawatan dan pengobatan. Tetapi dalam RUU KUHPidana 1999/2000, sama halnya dengan KUHPidana yang sekarang berlaku, juga tidak diatur mengenai pengawasan lebih lanjut terhadap orang yang dimasukkan ke rumah sakit jiwa.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dapat ditemukan Bab XIX tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Bab XX tentang Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Dalam Pasal 270 yang terletak dalam Bab XIX K.U.H.A.P. dikatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Pasal 270 ini berlaku umum, termasuk juga pelaksanaan tindakan untuk memasukkan seseorang ke Rumah Sakit Jiwa. Tetapi pengawasan dan pengamatan lebih lanjut yang diatur dalam Bab XX KUHPidana tersebut, terutama hanyalah berkenaan dengan pelaksanaan putusan pengadilan untuk memasukkan terpidana ke dalam lembaga pemasyarakatan. Tidak disinggung secara tegas mengenai pengawasan dan pengamatan terhadap seorang yang dikenai tindakan untuk dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa.

Menurut penulis, dalam KUHPidana Nasional mendatang perlu diadakan ketentuan mengenai bagaimana pengawasan terhadap orang yang dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa itu. Jalan lainnya, yaitu berupa penambahan pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, berkenaan dengan pengawasan dan pengamatan terhadap seorang yang dikenai tindakan dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa.

#### PENUTUP :

##### A. Kesimpulan

1. Keadaan jiwa cacat dalam pertumbuhan yang dimaksudkan oleh Pasal 44 ayat (1) KUHPidana adalah

keterbelakangan perkembangan sejak yang telah dibawa sejak lahir, di mana yang umumnya digolongkan di sini adalah :

- a. golongan idiot yang I.Q.-nya kurang dari 25;
- b. golongan imbesil yang I.Q.-nya 25-49.

Golongan debil, I.Q.-nya 50-70, yang umur intelegensinya seperti anak umur 7-16 tahun, umumnya dianggap tergolong sebagai orang yang kurang mampu bertanggung jawab (*verminderde toerekeningsvatbaarheid*), yang dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk meringankan pidana.

Keadaan jiwa terganggu karena penyakit yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana adalah keadaan jiwa yang tergolong psikosa berat.

2. Dalam Pasal 34 RUU KUHPidana 1999/2000 tidak lagi digunakan istilah "pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit", melainkan menyebut sebagai alasan untuk tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah : gangguan jiwa, penyakit jiwa dan retardasi mental. Gangguan jiwa dan penyakit jiwa dalam RUU KUHPidana 1999/2000 ini dapat dibandingkan dengan jiwa yang terganggu karena penyakit dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana, sedangkan retardasi mental dapat dibandingkan dengan pertumbuhan jiwanya cacat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana RUU KUHPidana 1999/2000, berkenaan dengan orang yang dikenakan tindakan (*maatregel*) berupa perawatan di Rumah Sakit Jiwa, tidak lagi disebutkan tentang waktu percobaan yang selama-lamanya 1 (satu) tahun, tetapi, dalam RUU ini, sama halnya dengan KUHPidana yang sekarang berlaku, tidak diatur pengawasan lebih lanjut terhadap orang yang dimasukkan ke rumah sakit jiwa.

B. Saran

1. Di kalangan golongan debil, yaitu yang ber-I.Q. 50-70, dengan umur intelegensi seperti anak-anak umur 7-16 tahun, seharusnya diadakan suatu perbedaan. Mereka yang sekalipun tergolong debil, tapi memiliki I.Q. yang tertinggi dalam golongan itu, yaitu mendekati 70, seharusnya lebih tepat digolongkan sebagai orang yang kurang mampu bertanggungjawab saja, bukannya sebagai orang yang tidak mampu bertanggungjawab sama sekali.
2. Perlu diadakan ketentuan tentang pengawasan dan pengamatan seorang yang dikenai tindakan dimasukkan ke Rumah Sakit jiwa, baik dimasukkan ke dalam KUHPidana Nasional mendatang atau berupa penambahan pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bemmelen, J.M. van,, Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Kartanegara, Satochid, Hukum Pidana, I, kumpulan kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Kanter, E.Y., Sianturi, S.R., Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- Kartono, Kartini., Psikologi Abnormal & Pathologi Seks, Alumni, Bandung, 1979.
- Lamintang, P.A.F., Samosir, C.D., Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Moeljatno., Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, cet.ke-2, 1984.
- Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992, Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Baru). Buku Kesatu – Buku Kedua, Departemen Kehakiman, fotokopi, tanpa tahun.
- Pariaman, H. Hasan Basri Saanin Dt. Tan., Psikiater dan Pengadilan, Binacipta, 1976.
- Poernomo, Bambang., Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono., Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-2, 1974.
- Rancangan Undang-undang Nomor ... Tahun ... tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 1999-2000
- Seno Adji, Oemar., Hukum (Acara) Pidana di Indonesia, Erlangga, Jakarta, cet.ke-2, 1976.
- Soekanto, Soerjono., Pengantar Ilmu Hukum, UI Press, Jakarta, 1982.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Pengantar Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., Hukum Pidana I, Penerbitan Universitas, Bandung, cett.ke-2, 1962.
- , Hukum Pidana II, Penerbitan Universitas, Bandung, 1962.